



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : STAF AHLI BUPATI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL APIPUDIN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**
3. NHK : **141122**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.350.000.000**

1. Tanah Seluas 388 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 10363 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 270.000.000
3. Tanah Seluas 3499 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 3772 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 1985 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 115.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/267 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 155.200.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT Tahun 2015,
LAINNYA Rp. 120.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	13.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	114.511.026
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.633.061.026
III. HUTANG	Rp.	29.113.736
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.603.947.290

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.